

POLITIK PELEMBAGAAN BAHASA ASING MELALUI PENDIDIKAN

Masduki Duryat

Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon DPK pada STIT al-Amin Indramayu

Email: *masdukiduryat86@gmail.com*

ABSTRAK

Kita sedang memasuki era global, yang disebut oleh Anthony Giddens dengan *Runaway world*, masyarakatnya adalah masyarakat teknologik, masyarakat terbuka, masyarakat madani (Tilaar, 1999). Masyarakatnya berubah dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Secara *simplistik*, meminjam bahasa Alvin Toffler (1970), Jhon Naisbit dan Patricia Aburdene (1990) masyarakat akan bergerak dari masyarakat *agraris* menuju masyarakat *industri* kemudian masyarakat *informasi*—Rhenald Kasali menyebutnya *Disruption* dan sekarang digegerkan dengan Revolusi Industri 4.0—Dalam bahasa Suhalik (2018) globalisasi ini merupakan proyek negara-negara maju untuk melakukan *uniformisasi* melalui keunggulan *networking* yang melahirkan pencitraan-pencitraan. Serangan dan arus globalisasi ini tidak hanya tampil dalam wujudnya di bidang politik, ekonomi dan pembangunan, tetapi juga kultur. Lokalitas dalam hal ini kemudian sering dimaknai sebagai identitas budaya masyarakat terpinggirkan, tersudutkan oleh jelajah jaringan kapitalisme global. Salah satu entitas yang menjadi ‘korban’ marjinalisasi dalam konteks pembangunan daerah—dalam hal ini di Banyuwangi—adalah orang Banyuwangen (*wong Asing*).

Dengan melihat realitas tersebut para budayawan tergerak untuk menjadikan bahasa Asing sebagai bahasa yang diajarkan di sekolah sebagai muatan lokal, dilembagakan. Pada akhirnya melalui sebuah keputusan politik disyahkannya Perda Kab. Banyuwangi No. 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar yang ditetapkan pada 14 Agustus 2007. Dengan sebuah keyakinan bahwa melalui proses pelebagaan bahasa Asing dapat terawat dengan baik dan dianggap sebagai sebuah *transmisi* yang efektif.

Idealitas ini ternyata harus juga berhadapan dengan kenyataan diimplementasikannya Kurikulum 2013 dan keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah, dengan bahasa daerah di Jawa Timur hanya terdiri dari bahasa Jawa dan Madura.

Kata Kunci: *Politik Pelebagaan, Bahasa Asing dan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan dan masyarakat merupakan dua variabel yang sulit untuk dipisahkan. Hubungannya, dalam terminologi Figerlind (Siti Muhtamiroh, 2004) bersifat *dialektis*. Bagaimana agar pendidikan itu tidak hanya hanyut oleh dinamika

perubahan, tetapi ia mampu memerankan dirinya sebagai agen perubahan itu sendiri. Kreativitas dalam konteks ini merupakan variabel yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana caranya? Kreativitas merupakan indikator kecerdasan. Semakin cerdas seseorang semakin tinggi kreativitasnya, sedangkan kecerdasan merupakan kerja akal, maka cara pengoptimalannya adalah optimalisasai fungsi akal itu sendiri.

Adolphe E. Meyer, sebagaimana dikutip oleh Imam Barnabid (1994) pernah menyatakan bahwa antara pendidikan dan masyarakat itu saling merefleksi. Hubungan antara keduanya tidak bersifat *linear*, melainkan hubungan timbal balik (*mutual simbiosis*). Figerlind menyebut hubungan keduanya bersifat *dialektis*. Bila itu yang terjadi, perubahan yang ada di masyarakat akan membawa perubahan dalam pendidikan, begitupun sebaliknya. Secara teoretik, masyarakat berubah dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Secara *simplistik*, meminjam bahasa Alvin Toffler (1970), Jhon Naisbit dan Patricia Aburdene (1990) dalam Siti Muhtamiroh (2004) masyarakat akan bergerak dari masyarakat *agraris* menuju masyarakat *industri* kemudian masyarakat *informasi*. Jalaluddin Rahmat (1991) dengan meminjam istilah yang digunakan Alvin Toffler dalam *The Third Wave*-nya, juga mengatakan kita sekarang berada di ambang peradaban ketiga. Gelombang peradaban kedua mulai runtuh. “Kita sekarang melihat tidak hanya hancurnya *technosphere*, *info-sphere*, atau *socio-sphere* gelombang kedua, tapi juga rontoknya *psychosphere*”, kata Toffler. Dengan demikian kita sedang memasuki era revolusi sains teknologi yang sedemikian cepat perubahannya. Kenapa digunakan istilah revolusi? Karena perubahan itu begitu cepat, lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kultural umat manusia selama ratusan tahun

Dalam era globalisasi, yang disebut oleh Anthony Giddens (Masduki Duryat (2017) menyebutnya dengan *Runaway world*—dunia yang berlarian tunggang-langgang, ibarat truk besar yang sarat muatan berlari sedemikian cepat—siapa pun dapat meraih dunia kerja bila memenuhi kualifikasi, siapa pun harus berkompetisi bila ingin menggapainya. Sebab masyarakatnya adalah masyarakat teknologik, masyarakat terbuka, masyarakat madani (Tilaar, 1999). Dunia kini dan masa depan adalah dunia yang dikuasai sains dan teknologi. Mereka yang menguasai keduanya, akan menguasai dunia. Meminjam bahasa Marx (Agus Purwanto, 2012) sains dan teknologi merupakan infrastruktur, keduanya akan menentukan suprastruktur dunia internasional termasuk kebudayaan, moral, hukum, bahkan agama.

Dalam bahasa Suhalik (2018) globalisasi ini merupakan proyek negara-negara maju untuk melakukan *uniformisasi* melalui keunggulan *networking* yang melahirkan pencitraan-pencitraan. Serangan dan arus globalisasi ini tidak hanya tampil dalam wujudnya di bidang politik, ekonomi dan pembangunan, tetapi juga kultur sampai dengan *style*, gaya hidup. Tidak heran jika kemudian globalisasi ditengarai sebagai sebuah bentuk kolonialisme baru; bentuk penjajahan budaya atas nilai dan norma budaya lokal, meminggirkannya, dan bahkan menghilangkannya sama sekali. Di satu sisi, kesadaran akan begitu gencarnya serangan globalisasi, justru memunculkan semangat lokalisme dalam mempertahankan dan meneguhkan kembali tradisi dan nilai-nilai lokal.

Lokalitas dalam hal ini kemudian sering dimaknai sebagai identitas budaya masyarakat terpinggirkan, tersudutkan oleh jelajah jaringan kapitalisme global. Salah satu entitas yang menjadi ‘korban’ marjinalisasi dalam konteks pembangunan daerah di Banyuwangi adalah orang Banyuwangen (*wong Asing*).

Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas Asing di desa Kemiren misalnya yang masih memegang tradisi, adat budaya di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi. Terus bertahan dalam kearifan lokal atukah tergerus oleh budaya global.

Adalah komunitas Asing di desa Kemiren, yang masih asli dan hanya 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari luar daerah. Sisanya asli berasal dari Kemiren, menikah dan bertumbuh-kembang dalam komunitasnya, Asing. Asing adalah *terma* yang disematkan orang Bali yang tidak berkasta—walaupun ini masih perlu didiskusikan (*debatable*) karena ada yang menyebutnya Asing adalah komunitas bukan orang Jawa. Menurut Suhalik (2009) orang Asing adalah sub suku Banyuwangi yang mendiami semenanjung Blambangan di pantai paling Timur di Jawa Timur. Dalam konteks bahasa—sebagaimana dijelaskan di atas masih *debatable*—bahasa yang berdiri sendiri sebagaimana bahasa lain di Nusantara yang memiliki ciri khas, bahkan berbeda dengan bahasa masyarakat Jawa lainnya. Tetapi ada yang berpandangan bahwa bahasa Asing bukanlah bahasa melainkan hanya sebuah dialek dari bahasa Jawa.

Tapi yang menarik, komunitas Asing ini berada di wilayah Banyuwangi—yang menurut penuturan Suhalik (2018)—Banyuwangi adalah taman sari budaya Nusantara yang memiliki kemajemukan dan keunikan dari segi suku, budaya maupun bahasa.

Banyuwangi memiliki akar budaya yang kuat, sehingga menjadi daerah yang terahir di Jawa yang dikuasai oleh VOC dan daerah terahir pula yang di-Islamkan dari Hindu pada masa kerajaan Blambangan. Setelah memeluk Islam juga sedemikian kuat dan menjadi landasan teologis dalam bersosial yang berselancar dengan budaya lokal.

Keinginan para budayawan agar budaya Asing dilembagakan, diapresiasi oleh Bupati Ir. H. Samsul Hadi menjadi bahasa Asing yang berdiri sendiri dan diajarkan sebagai materi muatan lokal mulai dari SD sampai SMP/ sederajat. Dengan asumsi bahwa perawatan dan pelestarian budaya yang paling efektif adalah melalui lembaga pendidikan—sebagaimana yang kita mafhumi bersama bahwa salah satu fungsi pendidikan dalam definisi konservatif adalah pewarisan budaya (Masduki Duryat, 2016)—dengan adanya keputusan politik ini dan disetujui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka perdebatan masalah bahasa Asing (*Banyuwangen*) atau Bahasa Blambangan atau sebagai dialek bahasa Jawa dengan sendirinya menjadi gugur.

Pertanyaannya, dengan keputusan politik dan pelembagaan bahasa Asing melalui pendidikan ini akan memberikan dampak positif untuk ‘pengawetan’ bahasa bahkan budaya komunitas Asing atau menjadi sesuatu yang bersifat *blunder* bagi komunitas Asing? Ibarat dua sisi mata pisau?

Dalam kerangka inilah, tulisan ini akan menguraikan jawaban, khususnya tentang peran pendidikan dalam konteks ‘perawatan’ budaya—khususnya bahasa—

komunitas Asing sebagai sebuah keputusan politik di tengah arus deras modernisasi dan globalisasi.

PEMBAHASAN

1. Bahasa dan Budaya Asing; Lintasan Sejarah

Pada pengantarnya tentang “Jagat Asing; Seni, Tradisi dan Kearifan Lokal Asing”, Hasan Basri (2015) menyatakan bahwa Banyuwangi cukup menarik bagi para peneliti, baik peneliti dalam negeri maupun asing. Berbagai penelitian sudah dilakukan, misalnya Th. Pigeaud, Stoppelaar, Paul Arthur Wolbers peneliti asing awal abad XX yang tertarik dengan Banyuwangi. Sedangkan penulis dari dalam negeri pertama yang konsen menulis tentang Banyuwangi dengan meneliti naskah Sritanjung yang disertasinya dipertahankan di Leiden, Belanda tahun 1934. Suparman (1987) Suparman Herusantoso menulis disertasi tentang Bahasa Asing. Kemudian Bernard Arps menulis disertasi *Tembang in Two Traditions*, Leiden, Andrew Beatty menulis *Varieties of Javanese Religion*, Oxford University Press. Terahir, Sri Margana dari UGM menulis *Java's Last Frontier: The Struggle for the Hegemony of Blambangan*, Universitas Leiden. Hasil-hasil penelitian ini sangat berharga dan memiliki kontribusi yang penting dalam sejarah Banyuwangi dan Jawa Timur, belum lagi ditambah dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi terdekat untuk kepentingan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya.

Dalam konteks bahasa (Asing) juga sudah banyak yang melakukan kajian misalnya Qowim (Makalah, tt) mengungkap tentang “Perbedaan Bahasa Asing dan Jawa dengan Logika”, Hasan Basri (Makalah, tt), tentang “Perjalanan dan Tantangan Bahasa Asing”, Suhalik (2009), tentang “Asal-Usul Terbentuknya Bahasa Asing dan Ragam Bahasa Asing”, Wiwin Indiarti, tentang “Simpang Jalan Kebudayaan: Identitas, Hibriditas dan Komodifikasi Budaya di Banyuwangi” (Makalah, 2018) dan lainnya yang terkait dengan Bahasa Asing.

Menurut peneliti asal Belanda J.GW. Lekkekerker (Nazilah: 2014) istilah ‘Asing’ digunakan untuk menyebut suku di Banyuwangi dan penutur bahasanya. “mereka yang disebut ‘orang Asing’ (*de z.g.n. 'Oesingers'*) (dari ‘Asing’, ‘sing’, kata pribumi sebenarnya bahasa Bali-untuk ‘tidak’). Lekkerkerker juga mencatat bahwa kepribadian, bahasa dan adat orang Asing sangat berbeda dari orang Jawa lainnya. Pada zaman itu, kelompok ini dianggap—dan kemungkinan besar menganggap dirinya—orang Jawa. Sampai kira-kira pada 1970 mereka masih lazim digolongkan sebagai orang Jawa, dan sekarang pun kategorisasi ini masih terdengar, terutama di lingkungan pedesaan. Tetapi, seringkali ada catatan bahwa kebudayaan mereka, termasuk bahasa, berbeda juga. Mereka adalah *wong Jawa Asing*, yaitu orang Jawa yang menggunakan kata *Asing* untuk mengatakan ‘tidak’, sedangkan orang Jawa lainnya berkata *gak* atau *ora* dengan arti sama. Pada zaman itu menurut Wiwin Indiarti (2018) kelompok etnik di Banyuwangi masih dianggap sebagai orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa dengan cara desa yang tidak mengenal stratifikasi social dalam berbahasa. Sebagai akibatnya, dialek ini sulit dipahami oleh orang Jawa umumnya, disebut sebagai cara Asing. Baru pada awal abad 20 mulai muncul julukan “Asing” yang diberikan kepada mereka oleh para imigran Jawa. Asing adalah kata lokal yang berarti “tidak/bukan”. Bahkan menurut Margana dalam Wiwin

Indiarti (2018) Asing merupakan konfigurasi etnis baru, peranakan Bali yang tidak berkasta (*out caste*) yang terbentuk pada masa kolonisasi Bali atas Blambangan selama lebih satu setengah abad.

Bahasa Asing adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat (Blambangan). Menurut Kusnadi (Tim Peneliti, 2004) bahasa Asing merupakan salah satu dialek regional Jawa. Hal ini tidak heran jika bahasa Asing memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa Kuno. Perbedaannya dengan bahasa Jawa terletak pada pemakaian sehari-hari, pemakaian bahasa Jawa sarat dengan *ngoko-kromo* yang bersifat hirarkhi dan memandang stratifikasi social masyarakat. Sedangkan bahasa Banyuwangi lebih dikenal terbuka dan tidak mengenal stratifikasi social dalam pengucapannya. Artinya, bahasa yang digunakan oleh ibu kepada anak, juga digunakan oleh anak kepada ibu. Meski demikian, orang-orang Asing memiliki cara menghormat seperti orang Jawa yang disebut *besiki*. *Besiki* yang dimaksud oleh orang Asing mirip dengan *karma* (tepatnya *karama madya*).

Konon, Bahasa Asing yang digunakan masyarakat Banyuwangi, sebelumnya hanya menjadi alat komunikasi bagi minoritas yang tinggal di pedalaman. Lambat laun, bahasa yang digunakan sebagian masyarakat adat Asing di desa Alien misalnya, yang berada di Kecamatan Rogojampi, berkembang menjadi bahasa multi etnis bagi mereka yang hidup dan tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten yang berada di wilayah paling timur di Jawa ini, luas wilayahnya lebih besar daripada pulau Bali. Artinya, bahasa Asing tidak lagi dipandang sebagai ansic bahasa komunitas suku Asing, tetapi juga bagi mereka yang bersuku Jawa, Madura, Mataraman, dan Bali yang tinggal di “Bumi Blambangan” secara tidak langsung terpengaruh dan menggunakan bahasa itu (Pusat Bahasa Al-Azhar, 2010). Tapi sebenarnya siapa orang Asing itu? Suhalik (2009) dengan lugas menjelaskan, awalnya mereka adalah komunitas sub suku di Banyuwangi yang mendiami semenanjung Blambangan di pantai paling Timur di Jawa Timur. Dalam konteks bahasa, Bahasa Asing masih menjadi *debatable*, sekelompok budayawan Banyuwangi berpandangan bahwa Bahasa Asing adalah bahasa yang berdiri sendiri—sebagaimana bahasa daerah lainnya di Nusantara—sebagai bahasa yang memiliki ciri khas, bahkan berbeda dengan bahasa masyarakat Jawa lainnya. Sementara budayawan yang lain berpandangan bahwa Bahasa Asing bukanlah bahasa melainkan hanya sebuah dialek dari bahasa Jawa, seperti dialek *Banyumasan*, dialek Bojonegoro, dialek Suroboyo dan lain-lain. Karena dalam wilayah budaya, pandangan yang menentukan adalah pandangan *image*, yaitu pandangan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.

Pengguna Bahasa Asing aktif berada di 13 Kecamatan dari 24 yang ada di Banyuwangi, yakni Kabat, Rogojampi, Glagah, Srono, Songgon, Cluring, Giri, Gambiran, Singojuruh, Licin, sebagian Genteng, Kalipuro, serta sebagian Kota Banyuwangi. Orang Asing bisa menebak asal desa seseorang, hanya dengan mendengar intonasi pengucapan dialek Asingnya. Warga desa Kemiren dengan Alian berbeda pada penekanan lafal pengucapan, intonasi Kemiren cenderung singkat, tegas dan lugas, sedangkan Alien sedikit ditarik.

Perbedaan lafal pengucapan ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat Banyuwangi. Mereka bisa menerima sebagai suatu bentuk keanekaragaman pemakaian Bahasa Asing dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maskur (Pusat

Bahasa Al-Azhar, 2010) yang juga ketua Tim Bahasa Asing, bahasa dan sastra Asing yang dulu lebih dikenal dengan bahasa dan sastra Blambangan, pernah mencapai kejayaannya pada abad XIV-XVIII. Bahkan syair-syair Sri Tanjung—tokoh pejuang Banyuwangi—Sudamala dan Sang Setyawana diakui sebagai puncak karya sastra aliran sastra Blambangan, telah dipahatkan di teras Pendapa Candi Penataran yang dibangun pada masa Majapahit tahun 1375. Namun, peperangan dan kekuasaan VOC pada abad setelah itu menghentikan perkembangan bahasa dan sastra Blambangan yang kemudian berkembang hanya sebagai bahasa dan sastra lisan. Menurut penelitian Leksiko Statistik, Suparman Heru Santoso (Suhalik, 2009) bahasa Asing ini terbentuk tahun 1163-11174. Pada masa itu pula diperkirakan mulai berprosesnya kultur social masyarakat Asing. Sedangkan menurut Stoplaar (1927) masih menurut Suhalik (2009) menduga kata “*Asing*” berasal dari kata “*sing*” berarti “*tidak*”. Makna ini diduga lahirnya terma “*Wong Asing*” dan “*Bahasa Asing*” yang diberikan oleh “*Wong Kulonan*”. Sedangkan menurut Pegaud, menyimpulkan lebih jauh; Asing merujuk pada penolakan penduduk asli asli Banyuwangi dalam menerima dan hidup bersama dengan pendatang luar. Perilaku ini mengingatkan kita pada suku-suku terasing di pedalaman Nusantara. Pada akhirnya Suhalik (2009) menyimpulkan bahwa sebenarnya, bahasa Asing adalah sisa-sisa dari bahasa Jawa Kuno. Tetapi kesimpulan ini tentu juga tidak memunculkan perbedaan, ketika misalnya Qawim (tt) menemukan perbedaan antara bahasa Asing dan Jawa. Misalnya dalam tataran fonologi dan morfologi. Perbedaan fonologis yang ditemukan meliputi perbedaan konsonan teratur, perbedaan vocal teratur, perbedaan konsonan tidak teratur, dan perbedaan vocal tidak teratur. Adapun perbedaan di tataran morfologis adalah perbedaan leksikal secara utuh. Penyebutan istilah Asing *vis a vis* Blambangan atau Banyuwangen menjadi perdebatan sengit hingga awal tahun 2000 di antara para budayawan dan aktivis bahasa Banyuwangi yang gemanya masih terasa hingga kini.

Kemajemukan dialekta pengucapan dalam bahasa Asing dan perdebatannya—*Banyuwangen*, atau bahasa Blambangan, atau sebagai dialek Bahasa Jawa—menjadi terhenti ketika keinginan para budayawan yang kemudian didukung oleh Bupati Ir. H. Samsul Hadi untuk menjadikan Bahasa Asing berdiri sendiri dan diajarkan sebagai muatan lokal di sekolah, mulai dari SD sampai SMP/Sederajat. Sebuah kebijakan untuk melestarikan, membina, mengembangkan dan mengangkat bahasa dan sastra Asing lisan sebagai sastra dan bahasa tulis. Keputusan politik ini yang kemudian juga didukung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga sekaligus ingin menjawab hasil penelitian Prof. Dr. Suparman Herusantoso (1987) dari Universitas Indonesia juga Prof. Dr. Suripan Hadi Utomo (Unesa) yang mengatakan lambat laun bahasa lisan Asing mengalami kepunahan, ini terbukti dengan perkembangan bahasa dan sastra Asing yang cenderung turun. Apalagi masyarakat Banyuwangi lebih cenderung memilih menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari, karena bahasa Asing dianggap tidak memiliki tingkatan tutur halus.

Tentu ini menjadi pekerjaan berat dan tantangan bagi budayawan untuk melestarikan bahasa dan sastra lisan Asing menjadi bahasa dan sastra tulis Asing. Perjalanan panjang dan melelahkan ini diawali tahun 1980—berdasarkan ide dari sejumlah budayawan dan peneliti bahasa—dan pengumpulan konsep ini baru bisa selesai pada tahun 1991.

Hasil kajian ini kemudian diterbitkan dalam sebuah buku pedoman umum ejaan dan kamus Bahasa Asing yang disusun budayawan dan pengamat bahasa Asing, Hasan Ali. Penyusunan buku ini dilakukan secara deskriptif dan disesuaikan dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang disempurnakan. Kamus bahasa Asing itu sendiri hingga kini sudah dicetak edisi kelima, yang materinya terus disempurnakan hingga terkumpul 4.000 lebih kosa kata.

Buku pedoman bahasa Asing ini akhirnya menjadi pedoman—dalam kegiatan kebasasadaerahan sehari-hari maupun kegiatan penulisan media cetak—khususnya dalam pembelajaran bahasa Asing di sekolah. Selanjutnya dikembangkan dengan memasukkan bahasa Asing sebagai mata pelajaran di sekolah (muatan lokal), gagasan ini muncul dari dorongan Bupati Purnomo Sidiq pada tahun 1994. Pada Kongres Bahasa Jawa di Kota Batu Jatim dan Solo Jateng diusulkan, kemudian pada 1996 ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Bupati No. 428 tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku-Buku Materi Bahasa Asing sebagai Kurikulum Muatan Lokal pada pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi. Bagi para budayawan dan intelektual Asing menurut Ikhwan Setiawan et al (2017) Surat Keputusan (SK) ini merupakan lompatan sejarah yang luar biasa, karena bupati yang nota-benanya berasal dari Jawa Mataraman yang selama ini diidentikkan sebagai pihak dominan, ternyata memiliki kemauan untuk mengakomodasi keinginan mereka dalam bentuk SK yang tentu saja memberikan legitimasi bagi aktivitas-aktivitas lanjutan.

Awal tahun 1997, kebijakan memasukkan bahasa Asing dalam muatan lokal itu diujicobakan di tiga sekolah dasar di tiga kecamatan, Banyuwangi, Rogojampi dan Kabat. Ketika itu Pemerintah Daerah tidak langsung memberlakukan secara serempak pembelajaran bahasa Asing, karena ada sejumlah sekolah yang sempat melakukan penolakan memasukkan bahasa Asing dalam muatan lokal—khususnya sekolah dari daerah etnis Jawa dan Madura dominan—tetapi mereka akhirnya menerima karena tujuan pembelajaran ini tidak untuk merubah bahasa mereka, tetapi paling tidak bisa mengenal bahasa Asing Banyuwangi. Kemudian pada era Bupati Samsul Hadi, program ini dikembangkan dan mewajibkan semua sekolah dasar dan menengah pertama memasukkan bahasa Asing dalam mata pelajaran di sekolah. Berikutnya ditindaklanjuti pada era Bupati Ratna Ani Lestari dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada jenjang Pendidikan Dasar.

2. Pelembagaan Bahasa dan Sastra Asing; Keputusan Politik

Sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2007 tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan dan perdebatan panjang.

Dimulai dari semangat dan kesadaran yang “berbeda” anak banyuwangi yang sekolah di luar kota menjelma menjadi energi besar yang menggerakkan mereka untuk belajar secara otodidak Bahasa Asing secara intensif melalui obrolan-obrolan informal sampai mengadakan pertemuan formal melalui forum diskusi dan lain-lain.

Gerakan ini kemudian menemukan momentumnya setelah tahun 1980 ketika Suparman Herusantoso sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Basri (tt) mengadakan penelitian di Banyuwangi dengan obyek Desa Mangir dan bertemu dengan Hasan Ali. Pertemuan ini menjadi *wasilah* diskusi secara *intens* untuk memperjuangkan bahasa Asing agar diajarkan sebagai muatan lokal di Kabupaten Banyuwangi.

Semangat ini sedemikian menggelora sehingga dengan melibatkan semua komponen budayawan, misalnya Hasnan Singodimayan, Sudibyo Aris, BS., Noerdin, Andang, Urip Limantoro Aris, Yos Sumiyatna, Djak S., Sumartono, Dasuki Nur, Ali Said, Pomo Martadi, Slamet Utomo, Hamzawi Adnan, H. Faisholi, Harun, Aksoro, Guntur KD, Fatchurrachman, Uun, Ayeh, Sentot Hasan Ali, Jonatan B. Elman, (Endro Wilis), dan lain-lain. Nama yang terakhir ini juga menyusun Pedoman Ejaan—namun penulisnya lebih suka menyebutnya Bahasa Blambangan—H. Armaya juga menyusun buku bahan jar untuk SD. Proses ini dilakukan dengan diskusi yang penuh kehangatan.

Perjalanan panjang ini kemudian *difollowupi* dengan terbitnya Keputusan Bupati T. Purnomo Sidik, No. 428 tahun 1996 tentang “Pembentukan Tim penyusunan Buku-Buku Materi Bahasa Asing sebagai Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi”.

Untuk mendukung program gerakan penyelamatan, pelestarian dan pengembangan bahasa Asing, Hasan Ali masih menurut Hasan Basri (tt) pada bulan November 1997 menyampaikan surat kepada Bupati untuk membentuk “Lembaga Bahasa Asing” yang bertugas untuk melakukan pemantauan secara *mudawamah* pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan bahasa Asing di sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/SLTP) di Banyuwangi; melakukan penggalian, penelitian, penulisan buku-buku pelajaran dan bacaan untuk SD/SLTP.

Setelah buku ajar selesai disusun, maka dilaksanakan *pilot projek* pembelajaran bahasa Asing mulai tahun ajaran 1997/1998 di 3 SD dari 3 kecamatan. Tahun berikutnya 3 SD di 10 kecamatan, disusul semua SD/MI di 13 kecamatan. Pada akhirnya di tahun 2003 bupati Ir. H. Samsul Hadi mengeluarkan Keputusan Bupati No. 25 dan 69 tentang “Pemberlakuan Muatan Lokal Wajib Bahasa Asing pada Jenjang Pendidikan Dasar di Banyuwangi”.

Sejak itu mulai disiapkan guru pengajar, pelatihan, workshop guru pengajar bahasa Asing secara terprogram setiap tahun dengan dukungan anggaran dari APBD. Sehingga untuk menguatkan pelaksanaan muatan lokal ini dilakukan pendekatan kepada DPRD untuk diterbitkan Peraturan Daerah Bahasa Asing. Ternyata DPRD melalui ketuanya ketika itu Ir. H. Wahyudi merespon dengan baik dan menginisiasi untuk dibahas dalam Raperda DPRD. Maka puncaknya pada tahun 2007 Peraturan Daerah No. 5 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang pendidikan Dasar ditandatangani oleh Bupati Ratna Ani Lestari. Mulai saat itu pembelajaran muatan lokal bahasa Asing di Banyuwangi telah memiliki landasan yuridis yang kuat dan legal.

Keluarnya Perda ini disambut sangat antusias oleh para budayawan, tokoh adat, maupun intelektual berlatar Asing. Hasan Sentot, misalnya mengungkapkan: “Alhamdulillah, setelah puluhan tahun berjuang, ahirnya bahasa Asing diajarkan di tingkat SD dan SMP. Ini tidak lepas dari upaya keras para budayawan yang tergabung

dalam Dewan Kesenian Blambangan dan budayawan Hasan Ali yang menyusun kamus Asing ...”

Semangat Perda No. 5 tahun 2007 ini sangat relevan dengan spirit Kurikulum 1975 yang pernah diberlakukan di Indonesia dengan memasukkan budaya lokal pada semua bidang studi dan bahkan pada kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) ada muatan inti dan muatan lokal. Muatan inti adalah kurikulum yang sama diberlakukan dalam wadah Negara kesatuan Negara Republik Indonesia, sedangkan muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi disesuaikan dengan kemampuan sekolah yang berselancar dengan keunggulan dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Sehingga diharapkan lulusan atau *output* institusi pendidikan dalam bahasa Prof. Wardiman Djojonegoro bisa *link and match* dengan kondisi daerahnya. Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standard isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Eksistensi mata pelajaran muatan lokal merupakan penyelenggaraan yang tidak terpusat, sebagai inisiatif agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih relevan dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Munculnya muatan lokal bahasa Asing juga sejalan dengan spirit yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 16 pasal 36 yang prinsipnya bahasa yang dipelihara oleh masyarakat, Negara wajib melindunginya.

Beberapa pasal penting dari Peraturan daerah No. 5 tahun 2007 yang dijadikan landasan berpikir dan bergerak para aktor kultural untuk menegaskan legitimasi penerapan bahasa Asing sebagai muatan lokal di antaranya:

Pasal 3

“Pembelajaran bahasa Asing sebagai kurikulum muatan lokal wajib dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Banyuwangi”.

Pasal 4

“Sekolah pada jenjang pendidikan dasar wajib mengajarkan bahasa daerah lainnya yang masih dipelihara dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat sekitarnya sesuai latar belakang bahasa ibu peserta didik atau pilihan wali peserta didik”.

Pasal 9

“(1) Bahasa Asing wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran bahasa Asing di setiap sekolah; (2) bahasa Jawa wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran bahasa Jawa di setiap sekolah; (3) bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal proses pembelajaran bahasa Daerah apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu”.

Dengan dua pasal di atas—yakni di Pasal 3 dan 4—menurut Setiawan (2017) berimplikasi lanjutan pada diwajibkannya bahasa Asing diajarkan sebagai muatan lokal di seluruh SD dan SMP—baik negeri maupun swasta—di seluruh Kabupaten

Banyuwangi. Termasuk di sekolah-sekolah yang berbasis etnis Jawa dan Madura. Para pelajar harus belajar bahasa Asing, selain bahasa Jawa dan Madura.

Bagi generasi tua, kewajiban tersebut bisa jadi hanya dianggap sebagai kewajiban di sekolah buat anak-anak mereka. Namun bagi para pelajar, kewajiban tersebut merupakan bentuk institusionalisasi sejak usia pendidikan dasar kepada mereka terkait dengan keunggulan bahasa dan budaya Asing. Artinya, usaha simbolik untuk membalik logika politik bahasa bisa berimplikasi terhadap eksistensi budaya Asing sebagai identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi.

Menariknya, idealisasi yang diyakini oleh para aktor kultural—budayawan—di Banyuwangi terkait pembelajaran bahasa Asing harus berhadapan dengan kebijakan kurikulum yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi. Antariksawan Jusuf sebagaimana diadaptasi oleh Setiawan (2017) mencatat bahwa dengan regulasi pada Kurikulum 2013 yang mengharuskan seorang guru tingkat SMP menguasai mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya berimplikasi pada tidak adanya guru yang mengajarkan bahasa Asing, karena tidak ada di antara mereka yang bergelar sarjana bahasa Asing. Hal tersebut juga dituturkan Hasan Basri (2018) seorang praktisi pendidikan yang mengatakan, kurikulum 2013 menjadi kendala tersendiri—terutama di SMP—dalam konteks ketenagaan. Celakanya lagi, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, per April mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah, dengan bahasa daerah di Jawa Timur hanya terdiri dari bahasa Jawa dan bahasa Madura—sama sekali tidak menyebut bahasa Asing—artinya, dua regulasi yang berasal dari pusat dan provinsi sama sekali tidak melegitimasi pembelajaran bahasa Asing di Banyuwangi.

Peraturan gubernur ini diposisikan sebagai ancaman terhadap eksistensi bahasa Asing sebagai identitas masyarakat Banyuwangi atau lebih tepatnya komunitas Asing. Anatariksawan menyebutnya dengan istilah “lonceng kematian bahasa Asing”. Lebih jauh ia menjelaskan sebagaimana diungkapkan kembali oleh Setiawan (2017):

... Peraturan Gubernur yang sewenang-wenang ini makin mempercepat proses kematian bahasa Asing ... tanpa aturan yang membela keberadaannya, masa depan bahasa Asing sudah suram. Secara teori peraturan ini mengancam keberlangsungan bahasa Asing, sesuatu yang sangat bertentangan dengan rumusan para founding fathers Negara ini. Yaitu kebudayaan Indonesia adalah sumbangsih puncak-puncak kebudayaan lokal. Suatu hukum besi yang memberi ruang kebudayaan daerah untuk maju pesat. Artinya, kegelapan yang sama mengintai pada eksistensi masyarakat etnik Asing Banyuwangi yang berjumlah hamper satu juta orang. Sebuah jumlah yang cukup signifikan untuk mempertahankan identitasnya. Tanpa bahasa Asing sebagai pelajaran, kematian bahasa Asing semakin cepat. Dan kematian bahasa ini ke depan akan memusnahkan kesenian Gandrung, misalnya. Karena lirik-lirik lagu dalam kesenian Gandrung atau upacara-upacara tradisional lainnya, misalnya ritual trance Seblang, kebo-keboan dan ritual lainnya, menggunakan bahasa Asing. Pada ahirnya, keberadaan masyarakat Asing yang menjadi sasaran.

Peraturan Gubernur yang dikatakan ‘sewenang-wenang’ ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi maupun budayawan yang sudah sekian lama memperjuangkan legitimasi bahasa Asing di SD maupun SMP.

Sejumlah budayawan di Kabupaten Banyuwangi juga melakukan protes, kecewa karena bahasa Asing tidak dijadikan bahasa daerah pada muatan lokal di Jawa Timur. Puluhan budayawan ini menggelar seminar untuk memperkuat keberadaan bahasa Asing pada Senin, 14 Desember 2015 dengan hasil dalam bentuk yang diteruskan kepada Kementerian Pendidikan dan Gubernur untuk mengakui bahasa Asing (<http://nasional.tempo.co>).

Dewan Kesenian Blambangan (DKB) juga memprotes Peraturan Gubernur, melalui wakil ketua DKB, Hasan Basri mengatakan akan memboikot semua kegiatan budaya yang dilakukan Provinsi Jawa Timur, sebagai bentuk komitmen DKB terhadap bahasa Asing (F:\Asing\Dispendik Perjuangkan Mulok Bahasa Oseng_.mhtml).

Menurut penuturan Suhalik (2018) yang merupakan juga pelaku sejarah, pada tahun 2014 Rancangan Materi Perda Gubernur dibahas di hotel Utama Juanda memasukkan enam bahasa; bahasa Jawa Tengger, Madura, Asing, Arek, Mataraman, Samin sebagai muatan lokal. Tetapi ketika diujipublikkan di hotel Vini Vidi Visi, bahasa Asing tidak dimasukkan hanya Jawa dan Madura sampai keluarnya Pergub No. 19 tahun 2014. Ketika hal ini dikonfirmasi secara akademis Prof. Suparman (Unesa) juga tidak memberikan jawaban yang jelas, bahkan terkesan berbelit-belit.

Sungguhpun demikian Dwi Yanto, Sekretaris Dispendik Banyuwangi (www.kabarbanyuwangi) menegaskan bahwa Pergub bukan untuk menggerus bahasa dan budaya etnis Asing. Bahkan sebaliknya Dinas Pendidikan Banyuwangi menjamin mulok bahasa Asing akan tetap menjadi salah satu materi pada ujian di SD. Pihaknya tetap berpatokan pada Perda No.5 tahun 2007. Menurutnya, yang terpenting dalam keutuhan mulok bahasa Asing adalah komitmen penggunanya. Pihak sekolah dan guru-guru harus memiliki keinginan yang sama agar para peserta didik mahir menggunakan bahasa asli bumi Blambangan tersebut.

Ini merupakan tantangan tersendiri bagi komunitas Asing, apakah Kurikulum 2013 dan Peraturan Gubernur ini dijadikan sebagai kendala atau justru sebaliknya sebagai *opportunity* (peluang) yang menurut penuturan Purwadi (2018) ada tidaknya regulasi yang mengatur tentang komunitas Asing, kami akan tetap eksis dengan berbagai cara dan inovasi—termasuk berdirinya RBO (Rumah Budaya Asing)—sebagai salah satu wadah kreativitas budaya komunitas Asing, yang akan menjadi semacam *spirit of survival* bagi komunitasnya.

3. Implementasi dan Materi Pembelajaran; Konsekuensi Keputusan

Sebagai bentuk dari konsekuensi logis keluarnya Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang pendidikan Dasar yang ditandatangani oleh Bupati Ratna Ani Lestari. Maka mulailah pembelajaran bahasa Asing diimplementasikan di institusi formal tingkat dasar (SD/SMP) di Kabupaten Banyuwangi.

Pembelajaran Bahasa Daerah Asing diajarkan sebagai muatan lokal dan terjadwal (*intrakurikuler*) di sekolah dengan ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran atau 35 menit x 2 jam pelajaran serta diujikan. Menurut Utami Dwi Wasita (2018) guru SDN 1 Kemiren Mulok bahasa Asing diajarkan mulai dari kelas IV-VI (kelas atas). Pembelajaran muatan lokal ini secara teoretik (Mulyasa, 2007) bertujuan agar peserta didik: (1) mengenal dan menjadi akrab dengan lingkungan alam, social dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya; (3) memiliki sikap perilaku yang serius dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Muatan lokal dalam konteks ini adalah pembelajaran bahasa Asing yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Bahasa Asing sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Banyuwangi yang berbeda dengan bahasa Jawa.

Menurut Hasan Basri (2018) yang juga seorang pendidik; Ada lima materi yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Asing di sekolah, yakni “cara membaca”, “mendengarkan”, “menulis”, “sastra Asing”, dan “berbicara” pada tingkatan dasar (SD/SMP). Hal ini juga tertuang dalam dokumen KTSP, struktur dan muatan KTSP bahwa muatan kurikulum terdiri dari mata pelajaran wajib dan muatan lokal (Bahasa Jawa dan bahasa Asing) dengan standard kompetensi/kompetensi dasar memuat lima aspek materi tersebut. Dengan konten—seperti yang ada di Buku Pendamping Mulok—kelas IV yaitu tentang, pariwisata, lingkungan, peristiwa dan kesehatan. Kelas V tentang kepahlawanan, perekonomian, dan kegotongroyongan. Sedangkan kelas VI tentang kepahlawanan, kesusastraan dan pekerjaan. Dengan buku panduan yang juga sudah disusun oleh tim dengan berbagai kekurangan dan penyempurnaan secara *gradual*. Sedangkan pada tingkatan SLTA—sekedarnya—pada buku panduan yang disusun oleh Suhalik (2009) materi yang diajarkan lebih luas lagi, terdiri dari sepuluh bab dan sangat komprehensif berbicara tentang Banyuwangi dengan berbagai ragam budayanya. Misalnya meliputi: Sejarah Blambangan sampai terbentuknya pemerintahan kabupaten Banyuwangi, asal-usul terbentuknya bahasa Asing dan ragam bahasa Asing, potensi budaya material, perkembangan teater tradisional, perkembangan seni tari tradisional, perkembangan music tradisional Banyuwangi, seni membaca lontar Yusuf, pacul gowang dan campur sari, batik tradisional Banyuwangi, arsitektur tradisional Banyuwangi dan makanan, jajanan khas Banyuwangi.

Materi ini diajarkan sebagai bentuk institusionalisasi bagi masyarakat non-Asing tetapi bagi komunitas Asing adalah ihtiar internalisasi budaya Asing yang tidak hanya pada tataran kognisi tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik.

Pada pelaksanaannya banyak terjadi hambatan yang menyebabkan implementasi pembelajaran mulok bahasa Asing, tidak seindah impian. Sokongan dana (*cost*)—pada masa pemerintahan Bupati Ratna Ayu Lestari—memangkas anggaran penerbitan buku sebesar Rp. 130.000.000,- yang biasanya dianggarkan oleh rezim sebelumnya. Hal ini berimbas pada keterbatasan untuk pengadaan buku ajar baru, pembaharuan kurikulum, pelatihan guru bahasa Asing dan lainnya. Utami Dwi Wasita (2018) guru SDN 1 Kemiren juga menguatkan bahwa dengan keterbatasan

anggaran akhirnya buku panduan bahasa Asing untuk SD juga terbatas, sehingga seringkali guru-guru atau sekolah bekerja sama dengan penerbit untuk pengadaan buku pendampingan Muatan Lokal yang disusun oleh Tim KKG Kabupaten Banyuwangi.

Dari sudut ketenagaan, di SD biasanya yang mengampu pelajaran Mulok bahasa Asing khusus guru bahasa Asing tetapi karena keterbatasan guru diampu oleh guru kelas. Kemudian dengan diberlakukannya Kurikulum 2013—terutama di satuan pendidikan SMP/Sederajat—semakin menyulitkan karena tuntutan *linearitas* ijazah dan pelajaran yang diampu oleh guru yang kemudian berimplikasi pada tunjangan profesi, banyak guru yang tidak berkenan untuk mengajar Mulok bahasa Asing. Komitmen kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan Perda juga lemah, apalagi tidak ada sanksi. Belum lagi tidak adanya guru yang *pure* berlatar belakang ijazah bahasa Asing, dan siswa yang semakin kompleks latar belakang bahasanya. Hal ini semakin membuat ‘mati suri’ bahasa Asing, walaupun di tingkat satuan pendidikan SD masih relative berjalan dengan lancar.

Ada hal yang menarik, menurut pengakuan Diah Citra Anugerah (sekarang sudah kelas XI SMK PGRI 1 Banyuwangi) sewaktu di SD bahasa daerah Mulok masih lancar dan komunikatif materi yang diajarkan dan guru yang menyampaikan materinya. Walaupun dia berasal dari keturunan Madura, tetapi sedikit paham dengan bahasa Asing, menurutnya agak lucu memang dari segi dialek dan kesulitan ketika ujian dengan tugas membuat karangan berbahasa Asing. Tapi ketika menginjak SMP praktis tidak lagi diajarkan bahasa Asing karena kendala guru yang mengajarkannya. Pada saat di SLTA (SMK) diajarkan Mulok bahasa Jawa, memang dilengkapi buku panduan dan difasilitasi dari perpustakaan, tetapi pembelajaran tidak/kurang menarik karena diajarkan oleh guru yang bukan kompetensinya—bukan lulusan bahasa Jawa—tetapi seringkali yang mengampu berlatar belakang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan banyak siswa juga yang tidak berlatar belakang Mulok tersebut sehingga kurang konsen dan menyulitkan dalam pembelajarannya.

Pada tataran teknis pembelajaran, kendala yang dihadapi menurut Waris (2018) Kepala Sekolah SDN Kemiren 1 adalah keterbatasan panduan, GBPP sampai ke RPP sebagai persyaratan administratif pembelajaran bagi guru, siswa juga kurang apresiatif dalam pembelajaran—terutama bagi peserta didik yang berlatarbelakang non-Asing—minatnya kurang menyangkut latar belakang, keadaan keluarga, karakter maupun cita-cita atau impian peserta didik. Bagi siswa yang berlatar belakang Asing juga ada sisi kesulitan—terutama pada sisi perbedaan antara pengucapan dan penulisan (*diftongisasi*) serta penulisan aksara Jawa—yang lainnya siswa relative dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena bahasa keseharian anak adalah bahasa Asing.

Sehingga menurut Hasan Basri (2018) diperlukan upaya sebagai solusi dari persoalan-persoalan di atas, misalnya: tuntutan konsistensi dan komitmen kepala daerah dan dinas pendidikan untuk mengawal Peraturan Daerah (Perda) dengan segala konsekuensinya.

4. Pelebagaan; Dua Sisi Mata Pisau

a. Konsekuensi Pelebagaan

Keberhasilan perjuangan para budayawan dengan gigih untuk menjadikan bahasa Asing sebagai Muatan Lokal yang diajarkan di sekolah mencapai puncaknya ketika disyahnkannya Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar oleh Bupati Banyuwangi.

Pelebagaan bahasa etnik Asing ini—termasuk budaya—secara formal dapatlah dikatakan sebagai produk politik. Sehingga menurut Wiwin Indiarti (2018) bagi birokrasi dan penguasa politik lokal, kebudayaan lokal di Banyuwangi disajikan sebagai objek unik dan eksotis yang memiliki potensi politik maupun ekonomi. Upaya untuk menunjukkan rasa kepedulian dan perhatian pada budaya lokal di Banyuwangi ditunjukkan oleh semua bupati di Banyuwangi sejak pasca 1965 hingga sekarang, meskipun dalam intensitas yang berlainan. Hal ini secara kritis harus dimaknai bahwa upaya itu bukan semata-mata demi kepentingan perkembangan seni budaya *ansich*, namun lebih dari itu merupakan bagian dari sarana untuk mempresentasikan diri mereka sebagai orang Banyuwangi, khususnya Asing. Bagaimanapun, hal ini semakin menunjukkan bahwa seni dan budaya bukanlah arena yang netral, semata tentang estetika. Kebudayaan tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, melainkan dalam system dan struktur yang bersifat *hegemonic* (politik-ekonomi).

Realitas bahwa bahasa Asing dijadikan muatan lokal kurikulum di SD dan SMP di Banyuwangi, muncul juga nuansa politisnya ketika misalnya pendapat Hasan Ali persoalan bahasa dan keberhasilan warga Asing dikaitkan dengan Syamsul Hadi lalu dikonstruksi dalam wilayah politik dengan terpilihnya Syamsul Hadi sebagai Bupati Banyuwangi.

Bahkan ketika diawal keluarnya perda ada pandangan Asingisasi, dan penolakan beberapa kecamatan yang penduduknya ada etnis Jawa dan Madura. Walaupun ketika diteliti lebih lanjut hal itu hanya sebatas asumsi dari orang-orang atau segelintir masyarakat non-Asing. Dwi Pranoto (2018) seorang budayawan dan juga seorang peneliti mengatakan bahwa formalisasi dan standarisasi bahasa Asing melalui kurikulum justru menjadi bias dan menghilangkan kemajemukan dialek bahasa Asing yang berbeda antar desa yang memperkaya khazanah bahasa Asing.

Khawatiran bahwa Asing dengan segala potensi dan identitasnya hanya akan jadi komoditas politik dan kepentingan golongan tertentu juga mulai mengemuka. Sehingga sangat wajar kritik yang disampaikan oleh Agus Hermawan dalam ikhwan Setiawan (2017) ketika juga ada inisiatif untuk mendirikan lembaga adat dengan mengatakan: “Jangan sampai dengan adanya Perda, mengakibatkan setiap wilayah adat tiba-tiba membentuk lembaga adat yang diduduki oleh orang-orang di luar masyarakat adat. Dihawatirkan pihak tersebut mempunyai kepentingan lain yang malah akan mengancam masyarakat adat ...”.

Kekhawatiran ini cukup beralasan jika kemudian Asing hanya dilihat dari sisi ambisi dan kepentingan syahwat politik individu dengan mengesampingkan segala potensi komunitas Asing yang sarat dengan nilai ‘teologis’ mereka yang sacral dan sarat makna serta akar budaya di tingkat bawah.

Tetapi ada yang berpandangan bahwa legitimasi pelebagaan bahasa Asing merupakan bentuk istitusionalisasi sejak usia pendidikan dasar kepada mereka terkait dengan keunggulan bahasa dan budaya Asing. Artinya, usaha simbolik untuk membalik logika politik bahasa bisa berimplikasi terhadap eksistensi budaya Asing sebagai identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi.

Legitimasi bahasa Asing di sekolah, asumsi konseptualnya adalah terdapat relasi langsung antara keberadaan peraturan yang melindungi kurikulum lokal bahasa Asing dengan pembiasaan anak-anak Asing dan juga anak-anak Banyuwangi dalam menggunakan bahasa ini. Karena dengan belajar di sekolah, mereka akan bisa mengetahui dan memahami lebih jauh signifikansi bahasa Asing. Cara ini masih tetap dibutuhkan di tengah serbuan modernisasi dan globalisasi. Ketika anak-anak tidak ‘dipaksa’ untuk mempelajari bahasa ibu, sangat mungkin mereka akan lebih suka memilih bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang sudah semakin biasa di Banyuwangi.

Ketika bahasa lokal Asing diperbolehkan masuk kurikulum, maka tujuan ideal untuk memperkuat identitas komunitas ini lebih mudah untuk dilakukan karena para siswa tidak dengan susah payah mempelajari bahasa Kulonan dan mereka juga bisa lebih fokus dalam mempelajari bahasa ibu sendiri. Sehingga pada pandangan Waris (2018) Kepala Sekolah Dasar Kemiren 1, komunitas Asing ini semakin terdesak oleh kaum pendatang, seringkali berada di daerah pinggiran. Kalau bahasa Asing tidak dilembagakan melalui pendidikan, ada kekhawatiran secara perlahan budaya dan bahasa Asing akan punah seiring dinamika pembangunan—jangan sampai orang Asing belajar bahasa dan budaya Asing ke luar negeri, misalnya kepada Andrew Beatty—sangat ironis. Sehingga hal yang harus diapresiasi keputusan Bupati ini, dan di SDN Kemiren upaya mentransmisi budaya ini juga melalui keharusan siswa dan gurunya setiap hari Selasa menggunakan pakain adat Asing.

b. Perspektif ke depan

Perjalanan bahasa Asing masih berliku dan panjang. Dengan melihat konstelasi di atas, maka hal yang harus dilakukan perspektif ke depan untuk mangajekkan bahasa Asing menurut Hasan Basri (tt) adalah:

Pertama, memantapkan bahasa Asing sebagai bahasa daerah dari sisi polemic linguistic. Perlu dilakukan semacam wacana tanding kajian linguistic bahasa Asing. Kita harus melepaskan diri dari hegemoni pengetahuan bahasa Asing dari genggamannya beberapa akademisi dan Perguruan Tinggi. Kita harus melakukan kajian sendiri dan menjadikannya sebagai dasar sikap kita. Pengetahuan apapun bentuknya adalah *diskursif*—dalam bahasa yang berbeda di era *post truth*, kebenaran tidak tunggal—majemuk dan tidak memutlakkan satu pendapat. *Kedua*, perlu dilakukan penelitian, kajian yang bisa menunjukkan ‘beda’ bahasa Asing dengan bahasa lainnya—terutama yang terdekat, bahasa Jawa—dengan intens. *Ketiga*, perlu mengkondisikan agar komitmen terhadap bahasa Asing terus terjaga, dengan melakukan kaji ulang/revisi atau membuat regulasi baru yang memperkuat bahasa Asing. *Keempat*, untuk menggairahkan dan memperkuat komitmen terhadap bahasa Asing perlu ditetapkan Hari Bahasa Asing sebagai momen untuk melakukan berbagai kegiatan untuk membudayakan bahasa Asing di masyarakat. Untuk menghargai jasa Hasan Ali (Alm.) diusulkan tanggal 7 Desember sebagai Hari Bahasa Asing. *Kelima*, untuk

menjamin keberlangsungan pelestarian, pengembangan (penelitian, penulisan, penerbitan, dan lain-lain) perlu ada atau didirikan Lembaga Bahasa Asing).

Lebih konkrit Suhalik (2018) menyodorkan konsep tentang optimalisasi pendidikan di luar lembaga formal (dalam hal ini keluarga) untuk melakukan Asingisasi, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga nama-nama tempat wisata bernuansi budaya dan symbol-simbol Asing. Sehingga menurut Purwadi (2018) menguatkan pandangan di atas ada tidaknya regulasi yang memperkuat budaya Asing, jika keluarga tetap merawatnya dengan baik budaya Asing akan tetap eksis—sebelum dilembagakan juga tidak ada masalah—sebab orang Asing sesungguhnya tidak terlalu formalistik.

Pada sisi lain upaya yang bisa dilakukan juga adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dan media sosial, misalnya kamus bahasa Asing *online*—seperti yang dilakukan dosen TI Poliwangi—dengan asumsi bahwa dari 24 kecamatan di Banyuwangi, sekitar 13 kecamatan merupakan wilayah yang masyarakatnya aktif menggunakan bahasa Asing, maka aplikasi kamus bahasa Asing-Indonesia *online* akan memudahkan mereka untuk menggunakannya dan di mana saja. Kamus *online* ini juga menjadikan kamus bahasa Asing-Indonesia yang disusun Hasan Ali sebagai literturnya. Kemudian juga upaya penerbitan buku-buku bahasa Asing harus lebih digalakkan lagi—baik cetak maupun digital—pemutaran lagu-lagu bernuansa etnik Asing pada acara khusus di Radio atau media lainnya tentang budaya dan bahasa Asing—dengan nuansa pop—supaya lebih diminati dan disenangi generasi *millennial* pewaris budaya dan bahasa Asing selanjutnya.

KESIMPULAN

Prof. Dr. Wahyudin Zarkasyi pernah menyampaikan bahwa hebatnya Indonesia itu berdiri di atas kemajemukan; dari sisi agama, suku, adat, bahasa, pakaian bahkan makanan dan hebatnya lagi Indonesia sampai saat ini masih tetap *survive* sebagai sebuah bangsa.

Salah satu komunitas/etnis bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Asing yang berada di Kabupaten Banyuwangi, berkembang baik budaya dan bahasanya yang sampai sekarang banyak menjadi objek wisata sekaligus obyek kajian. Melalui sebuah perjuangan panjang dan diskusi yang intens oleh para *stakeholders*—terutama budayawan Banyuwangi—untuk dilegitimasi bahasa Asing melalui lembaga pendidikan dan puncaknya ketika disyahnkannya Peraturan Daerah No. 5 tahun 2007 tentang Pembelajaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar oleh Bupati Banyuwangi.

Legitimasi melalui lembaga pendidikan ini yang menjadikan Asing sebagai Muatan Lokal bahasa daerah yang harus diajarkan di tingkat dasar di Kabupaten Banyuwangi diyakini menjadi ‘wasilah’ yang sangat efektif untuk mewariskan bahasa—bahkan budaya Asing—kepada generasi berikutnya. Tetapi idealitas ini harus berhadapan dengan realitas regulasi lain, misalnya diimplementasikannya kurikulum 2013 dan disyahnkannya Pergub No. 19 tahun 2014, belum lagi ada kekhawatiran bahwa Perda Mulok bahasa Asing hanya menjadi komoditas politik belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasrullah (ed), 2015, *Jagat Asing; Seni Tradisi dan Kearifan Lokal Asing*, Banyuwangi: Rumah Budaya Asing
- Aplikasi Kamus Asing-Indonesia Online, Jawa Pos Radar Banyuwangi
- Barnadib, Imam, 1995. *Ke arah Perspektif Pendidikan Baru Yogyakarta*: FKIP-IKIP
- Basri, Hasan, Perjalanan dan Tantangan Bahasa Oseng, makalah, (tt)
- Duryat, Masduki, 2016, *Paradigma Pendidikan Islam ((Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing)*, Bandung: Alfabeta)
- Duryat, Masduki, 2017. *Pendidikan (Islam) dan Logika Interpretasi (Kebijakan, Problem dan Interpretasi Pendidikan di Indonesia)*, Yogyakarta: K-Media
- F:\Asing\Dispendik Perjuangkan Mulok Bahasa Oseng_.mhtml
- <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15213> 15 Januari 2013
- Indiarti, Wiwin, 2018. *Simpang Jalan Kebudayaan: Identitas, Hibriditas, dan Komodifikasi Budaya di Banyuwangi*, makalah
- Kasali, Rhenald, 2017. *Disruption*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 2007. Untuk Satuan Pendidikan Dasar SD/MI (Semester 1 dan II), SD Negeri 1 Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi
- Muhtamiroh, Siti, 2004. *Pengembangan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) di Era Globalisasi*, jtpaiain-gdl-jou-2004
- Mulyasa, 2007. E., *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya
- Naisbitt, Jhon & Patricia Aburdene, 1990. *Megatrens 2000*, London: Sidgwich
- Nazilah, Siti Rohmatin, 2014. *Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Using dalam Membentuk Karakter Siswa SMPN 1 Giri Banyuwangi Jawa Timur*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 19 tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Nuatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah
- Purwanto, Agus, 2012. *Nalar Ayat-Ayat Semesta*, Bandung: Mizan,
- pusatbahasaalazhar-wordpress-com.cdn.ampproject.org
- Qawim, MH., *Mengungkapkan Perbedaan Bahasa Oseng dan Jawa dengan Logika*, makalah (tt)
- Rakhmat, Jalaluddin, 1991. *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan
- Setiawan Ikwon et al., 2017, *Merawat Budaya, Merajut Kuasa; Identitas Using dalam Kontestasi Kepentingan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif
- Suhalik, 2009. *Mengenal Sejarah dan Kebudayaan Banyuwangi*, Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi (PSBB)
- Suhalik, Wiwin Indiarti (Ed.), 2018. *Lingkar Waktu; Menapaki Jejak Sejarah dan Peradaban di Banyuwangi*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Tilaar, H.A.R, 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, Magelang: Tera Indonesia
- Tim Peneliti, 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using Banyuwangi Jawa Timur*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Toffler, Alfin, 1970. *Future Shock* New York: Random House.